

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Situasi ekonomi dunia pernah menghadapi gejolak krisis, begitu juga dengan Indonesia. Tidak sedikit negara yang mengalami keadaan perekonomian sedang teguncang. Tingkat perbedaan antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Bahkan angka kekayaan 359 orang setara dengan kekayaan 2,9 milyar orang-orang miskin di dunia. Sementara itu di bumi penduduknya terdapat 5 milyar. Separuh kekayaan bumi dikuasai dan dimiliki oleh segelintir orang. (Swanvri, 2012, hal. 1)

Selain adanya kesenjangan antara orang kaya dan miskin, negara juga mengalami hal yang serupa. Kesenjangan terjadi antara negara kaya dan miskin. Dalam 25 tahun, telah terjadi kesenjangan yang terus menerus melebar antara negara berkembang dan negara kurang berkembang, juga terjadi antara negara-negara penjajah dan negara-negara terjajah. Walaupun saat ini, kebebasan bernegara kita telah dilindungi oleh undang-undang internasional akan tetapi masih sangat banyak kekuarangan-kekurangan. Nasib negara miskin yang masih sering kali mempunyai kekayaan alam yang melimpah tidak mampu menikmati kekayaannya karena adanya pencurian nilai lebih. (Swanvri, 2012, hal. 4)

Bermula dari keadaan krisis ekonomi juga merambah ke krisis politik ataupun krisis sosial. Seperti yang terjadi pada negara di Timur Tengah yaitu Mesir, Libya, Tunisia, Irak, Iran, Suriah yang mengalami krisis politik. Negara-negara tersebut yang dulunya menggunakan gaya dengan sistem kekuasaan

bersifat otoriteristik militeristik dan berpaling menjadi sistem demokrasi yang Liberal. Kondisi inilah diperburuk dengan merambatnya krisis politik menjadi krisis Sosial yang ditandai dengan berbagai tanda misalnya dengan adanya perpecahan di dalam kubu rakyat. perpecahan ini terbagi menjadi dua, antara yang pro dan kontra. Banyak rakyat sudah menuntut kepada pemerintah untuk segera membuat langkah konkret dalam proses menyelesaikan permasalahan tersebut. Hingga ihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintah, membuat barisan oposisi dan sebagian lagi menjadi kelompok Radikal. (Swanvri, 2012)

Krisis pun tidak hanya terjadi di negara Timur Tengah saja. Pada tahun 2008, krisis ekonomi juga telah menghantam negara asal kapitalis liberal, Amerika Serikat. adalah negara yang menganut Kapitalis liberal yang selama ini telah diagung-agungkan sebagai ideologi tunggal di dunia yang telah dipercaya untuk membawa kemajuan dan kemakmuran bagi ekonomi yang mengalami kemandekan yang serius. (Sebastian Dullien, 2013, hal. 1-2)

Situasi Global di atas telah mempengaruhi situasi Nasional, di mana Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut pasar bebas juga terkena dampaknya. Seperti halnya yang terjadi di daerah perkotaan, merebaknya kaum marginal kota menjejali pinggiran-pinggiran perkotaan, dan lulusan-lulusan perguruan tinggi banyak menganggur dikarenakan lapangan kerja sempit. Melemahnya rupiah terhadap dolar juga mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang memecat pekerjanya untuk memperkecil tingkat resiko bangkrut, atau juga terjadi perusahaan-perusahaan mengurangi biaya produksi dengan menekan upah buruh agar tidak gulung tikar. (Sebastian Dullien, 2013)

Di Indonesia suatu harapan untuk membangkitkan tingkat perekonomian rakyat sering kita dengar karena salah satu pengalaman ketika mengalami krisis multidimensi tahun 1997-1998 tersebut usaha-usaha kecil telah terbukti mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan saat itu ekonomi kerakyatan mampu memainkan fungsi penyelamatan sektor kegiatan., fungsi penyelamatan itu terbukti pada sektor penyediaan kebutuhan rakyat melalui sistem produksi dan normalisasi distribusi. Sehingga dengan adanya pengalaman-pengalaman dan prestasi tersebut mampu diharapkan dalam masa yang akan datang pemerintah mampu lebih memperhatikan dan mulai melirik ekonomi rakyat. (Strisno, 2005, hal. 5)

Jika berbicara tentang ekonomi rakyat, tentu saja tidak pernah lepas dari sosok pahlawan kita yaitu Mohammad Hatta. Beliau sosok yang dikenal dengan sapaan nama akrab Bung Hatta ini merupakan salah satu pelopor ekonomi ekonomi yang berasaskan kerakyatan di negeri ini. Bung Hatta juga merupakan proklamator negeri ini, beliau dalam mengemukakan pemikirannya melalui pidato, maupun tulisan-tulisan buku yang ia karang sendiri. Bung Hatta tidak pernah melepaskan perhatiannya dan selalu memeberikan stressing akan pentingnya konsep ekonomi berasakan kerakyatan.

Di Perdesaan, banyak kasus terjadi. Misalnya, Petani yang merugi saat panen dikarenakan harga padi dipasaran hancur sebab pasar dibanjiri oleh produk impor. Bahkan ada yang menjual lahan pertaniannya untuk membayar hutang karena hasil produksi tidak sebanding dengan biaya produksi. Kondisi krisis

dunia telah dibicarakan oleh Mohammad Hatta dalam Tulisannya: (Muhidin, 2002, hal. 3)

“Dalam krisis hanya kelihatan keadaan yang aneh-aneh, yang tidak cocok dengan pengertian keadilan dan kebenaran. Selagi di beberapa tempat rakyat hampir mati kelaparan atau hampir tidak bisa makan, pada tempat yang lain benda makanan itu banyak berlebih. Di antaranya ada yang dilempar ke laut dan ada pula yang dijadikan kayu api. Misalnya di prasilia bermilyun-milyun karung kopi atau gandum dipakai sebagai pengganti batu arang untuk menjalankan pabrik, sebab barang-barang itu berlebih terlalu banyak dan tidak bisa dijual untung. Inilah suatu tanda, bagaimana ganasnya kehidupan yang semata-mata berdasar kapitalisme, yang digerakkan oleh motivasi mencari laba.”

Kemudian, Bencana kelaparan yang terjadi juga disebabkan karena tidak cukupnya lahan pertanian untuk memproduksi dan tidak terkontrolnya perkembangan manusia yang semakin cepat. Hal ini akan menyebabkan krisis pangan. Krisis pangan membawa manusia kembali pada jaman di mana manusia satu sama lain angkat senjata dan berperang, demi memperebutkan sumber kehidupan. Sejalan dengan Thomas Robert Malthus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tidak diimbangi pasokan makanan yang cukup maka akan menuju pada malapateka yaitu kemiskinan, kelaparan, serta kriminalitas (Malaka, 2000, hal. 47-49).

Untuk menanggulangi berbagai permasalahan pemenuhan terhadap kebutuhan hidup di atas, seorang ekonomi Inggris, Adam Smith (1723-1790) menyumbangkan pandangannya pada dunia yaitu sistem Kapitalisme. Sistem ini lahir atas dasar kritik terhadap dua madzhab ekonomi yang berkembang pada saat itu yaitu Madzhab Merchantilisme dan Physiokrat. Semangat individu dalam mengumpulkan kekayaan tanpa harus dibatasi oleh kekuasaan negara ini yang

diyakini sebagai proses pensejahteraan. Semangat liberalisme menjadi ruh dari kapitalisme (Malaka, 2000, hal. 50).

Perkembangan selanjutnya, dampak dari sistem ekonomi Kapitalisme menyebabkan Produksi dalam negara berlebih, akibatnya pasar jenuh dan over produksi. Sesuai dengan teori Imperialisme, ketika suatu wilayah mengalami kelebihan produksi maka hasil produksi akan dilempar ke negara lain garterhindar dari krisis dan negara mendapatkan keuntungan penjualan. Imperialisme Smenggunakan cara yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kolonialisme. Karena puncak dari Kapitalisme adalah imperialism (Malaka, 2000, hal. 32).

Fenomena-fenomena itu terjadi secara alami. Dalam sistem ekonomi kapitalis liberal, modal tersentral pada segelintir golongan. Sistem kapitalisme, yang dimotivasi oleh pencarian laba yang sebesar-besarnya. Hanya mengena keperluan pribadi dan tidak mengingat bahwa di tempat lain orang menderita kekurangan atau hampir mati kelaparan. Kehidupan orang banyak ditentukan oleh segelintir orang yang punya modal yaitu kapitalis besar (Muhidin, 2002, hal. 3-4).

Dalam teori ekonomi, awalnya manusia yang memproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Pasalnya, mereka tidak mampu memproduksi sendiri berbagai kebutuhannya. Hasil produksinya lalu dipertukarkan dengan sesuatu yang lain. Misalnya desa- desa menghasilkan beras, sayuran, daging, susu, buah, dan lain-lain. Dan kota menghasilkan barang-barang besi, perkakas pertanian, obat-obatan dan lian-lain. Barang-barang dari kota yang berlebih itu dipertukarkan dengan barang desa yang berlebih sebagai keperluan hidupnya (Malaka, 2000, hal. 40).

Kapital yang awalnya modal sedikit, lambat laun akan menjadi banyak dan besar. Dalam pemikiran David Ricardo, hukum penawaran dan permintaan (supply and demand) diterangkan bilamana sebuah permintaan lebih besar dibanding penawaran maka komoditas tersebut mendapat nilai yang tinggi dan ini bagus untuk si kapitalis. Kemudian barang tersebut akan diproduksi secara besar karena mendapat nilai lebih (surplus value) dari hasil pertukaran. Nilai lebih atau laba ini akan mengundang kapital lain untuk masuk pasar. Masuknya pesaing ke dalam pasar akan meningkatkan penawaran karena hasil produksi juga meningkat. Hal ini akan mendorong pada persaingan kapital, dan nilai barang akan menurun (Delianov, 2005, hal. 52-53).

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika produksi sudah memenuhi pasar dalam negara. Maka barang tersebut dipertukarkan dengan negara lain. Dari pertukaran ini, negara akan mendapat keuntungan. Misalnya, negara-negara maju seperti Jerman memproduksi pesawat terbang, negara Finlandia penghasil telpon genggam, atau negara Amerika memproduksi alat transportasi dipertukarkan dengan negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai bahan baku untuk membuat barang-barang di atas. Istilah ini menurut Ricardo disebut dengan keuntungan berbanding (Comparative Advantage). (Delianov, 2005, hal. 55)

Dari pertukaran berbanding di atas, seharusnya ke dua belah pihak mendapat kemakmuran atas apa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi tersebut. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya yang terjadi adalah pertukaran tak seimbang (Unequal Comparative Exchange) antara negara dunia pertama/negara maju dengan negara berkembang.<sup>14</sup>Negara-negara dunia ketiga (baca: negara

berkembang) tidak mampu memproduksi sendiri dan dibuat ketergantungan modal pada negara-negara maju. Dalam sejarahnya, negara-negara dunia ketiga, kapital tidak tumbuh dari dalam negeri, namun kapital itu dicangkok dari negara asal melalui kolonialisme ekonomi akibat dari imperialisme. Perkembangan kapital ini tidak alami. (Delianov, 2005)

Masifnya perkembangan kapital ini ditandai dengan revolusi Borjuasi perancis dan revolusi Industri Inggris dengan ditemukannya alat produksi berupa mesin uap oleh James Watt mengakibatkan percepatan produksi dan mengubah wajah dari sistem ekonomi politik kapitalisme. Negara-negara koloni menghadirkan mesin-mesin di daerah jajahan untuk menghasilkan komoditas yang lebih banyak. Di Nusantara, masifnya laju ekonomi juga didukung oleh sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) ditambah dengan lahirnya Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) dan dilengkapi dengan Politik Ethik (Ethiche Politiek). (Siregar, 2000, hal. 16-17)

Idealnya dari perkembangan ekonomi di atas, pertumbuhan ekonomi ditandai dengan pembangunan. Dari pembangunan, masyarakat mampu bekerja dan memiliki daya beli. Dari daya beli tersebut Negara mendapat retribusi, hasil dari transaksi jual beli masyarakat baik di desa dan di kota. Oleh negara, pajak tersebut dikembalikan lagi kepada rakyat berupa kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. (Muhidin, 2002, hal. 266)

Namun pada kenyataannya, masyarakat banyak yang miskin, penguasaan atas kekayaan negara hanya dikuasai oleh segelintir elit. Negara hanya dikuasai

oleh borjuasi nasional dan melayani kepentingan borjuasi internasional (Multi Nasional Corporation/Trans Nasional Corporation). (Muhidin, 2002, hal. 267)

Demikianlah sedikit gambaran pandangan ekonomi Mohammad Hatta. Pandangan ekonomi ini menekankan asas kerakyatan, kekeluargaan, dan syarat dengan dasar nilai dan moral. Dengan berdasarkan latar belakang inilah penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang strategi politik yang dilakukan oleh Mohammad Hatta dalam meningkatkan perekonomian rakyat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Politik Mohammad Hatta dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi politik yang digunakan oleh Mohammad Hatta Dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, menambah pengetahuan tentang strategi politik Mohammad Hatta.



- b. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu sosial khususnya tentang strategi politik Mohammad Hatta, dan menambah koleksi buku-buku perpustakaan yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan juga sebagai bahan masukan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian pustaka strategi Politik Mohammad Hatta.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Sepanjang sejarah pengetahuan sudah cukup banyak pemikir yang mengkaji tentang Mohammad Hatta dan tidak sedikit pula baik karya ilmiah maupun buku yang dilahirkan. Dari berbagai sejumlah tulisan yang ada, adapun penelitian yang telah penulis temukan yaitu:

1. Farid Luthfu Assidiqi dari Jurusan Ilmu Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang dengan Judul peneleitian Pemikiran Politik Bung Hatta Dalam Buku Tiga Jilid Berjudul Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi.
2. Mochamad Parmudi dari jurusan Ilmu politik Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul penelitian Perilaku politik Bung Hatta (telaah etika politik).
3. Asep Muharudin dari jurusan Ilmu Polittk Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul penelitian Pemikiran Politik Luar Negeri Mohammad Hatta.

4. Pangeran Nagari Hutabarat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan judul penelitian Pemikiran Politik Mohammad Hatta Tentang Demokrasi.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menekankan pada tokoh Politik Mohammad Hatta . Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah peneliti melihat bagaimana Strategi Politik yang digunakan oleh Mohammad Hatta dalam Menghidupkan Perekonomian Rakyat.

#### **F. Kerangka Teori**

Untuk melakukan analisis terhadap obyek yang akan dikaji, dalam hal ini konsep pemikiran Ekonomi Politik Mohammad Hatta. Teori analisis yang digunakan dalam meneliti data adalah menggunakan teori strategi kepemimpinan karena untuk menganalisis strategi pada masa kepemimpinan Mohammad Hatta, dan mengetahui strategi dalam kepemimpinan dibidang ekonomi.

Teori orang-orang terkemuka dan teori situasional, yang dikemukakan oleh Hersey (1976) yang telah berusaha memposisikan kepemimpinan sebagai dampak dari kekuatan yang tunggal, yang berdampak pada faktor individu dan berdampingan dengan faktor situasional yang telah terjadi. Pada teori ini terdapat faktor yang mempengaruhi misalnya faktor sifat yang efektif berkaitan dengan intelektual dan individu pemimpin, kondisi terkhusus yang dimiliki oleh pemimpin dalam perannya sebagai pemimpin, peran sebagai manusia biasa, dan juga keterkaitan dan keberhasilannya. (Chaniago, 2017, hal. 14)

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan metode-metode tertentu agar yang diuraikan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis yaitu dengan menetapkan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan pendekatan, sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang didasarkan atas penelusuran literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Literatur tidak hanya terbatas pada buku-buku saja, tetapi dapat dari berbagai sumber lain seperti teks, artikel, buletin, majalah, surat kabar, kaset, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian ini.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yang terkait konsep ekonomi politik Mohammad Hatta.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, dari para peneliti yang berhubungan dengan obyek penelitian skripsi ini. Data sekunder diperoleh dari buku Mohammad Hatta yang berjudul Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan. Dengan metode tersebut, teknik pengumpulan data adalah dengan membaca literatur primer dan sekunder. Kemudian melakukan verifikasi terhadap bagian-bagian literatur yang dapat dianalisis. Verifikasi ini dibutuhkan agar tidak ada pelebaran dalam aspek pembahasan dari obyek yang diteliti.

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang dipakai adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu analisa yang berangkat dari mendeskripsikan strategi ekonomi politik Mohammad Hatta, menginterpretasi, menganalisa secara kritis gar dapat melihat makna, nilai dan maksud yang dikehendaki dalam konsep tersebut, serta memberi kesimpulan sehingga dapat diperoleh pemahaman yang signifikan.

Adapun metodologi dalam menganalisa data pada penelitian ini meliputi

1. Metode Deskriptif, yaitu dengan memaparkan isi naskah dari pemikiran tokoh yang diteliti. Uraian ini adalah untuk mengidentifikasi detail dari suatu peristiwa atau pemikiran tokoh tersebut.
2. Metode Interpretatif, adalah dengan menyelami data yang terkumpul, kemudian menginterpretasikan maksud yang telah dijelaskan pemiki tersebut.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah peneliti dalam menulis dan membahas serta menyusun penelitian ini, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu sistematika

dan penyusunan secara menyeluruh berdasarkan garis besar penelitiannya.

Penelitian ini terdiri atas lima bab antara lain :

**Bab I:** Pendahuluan

Peneliti menjelaskan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Penelitian ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitiann serta sistematika penelitian.

**BAB II :** Tinjauan Umum

Peneliti menjelaskan teori secara singkat mengenai strategi dan ekonomi politik.

**Bab III:** Biografi Tokoh

Peneliti menjelaskan secara singkat mengenai riwayat hidup tokoh dan historis yang melengkapi pemikirannya.

**Bab IV:** Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan hasil dari penelitian bab ini menguraikan hasil dari rumusan masalah dalam penelitian,dan menguraikan dari hasil yang didapat oleh peneliti dalam bentuk deskripsi analisis secara mendalam mengenai hasil .

**Bab V:** Penutup

Peneliti menyajikan hasil akhir dari penelitian atau hasil keseluruhan dari penelitian berupa kesimpulan yang peneliti dapat dari hasil enelitian. Dan ditambah dengan saran-saran serta daftar pustaka.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN**

#### **A. Strategi Politik**

##### **1. Pengertian Strategi**

*Strategi* sendiri berasal dari bahasa Yunani “ *stratego* ” yang memiliki arti perencanaan atau pemusanahan melalui penggunaan sumber yang efektif (Arsyad, 2002, hal. 26). Sedangkan pengertian strategi menurut Crown Dirgantoro strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu kepemimpinan yang memiliki ketentraman, istilah ini pada mulanya dipakai dalam ilmu ketentaraan. (dirgantoro, 2001, hal. 5)

Menurut Lawrence dan William juga mengemukakan bahwa strategi ialah suatu rencana yang telah digabungkan secara keseluruhan, terpadu yang saling mengikat keunggulan strategi wilayah dalam perusahaan dengan rintangan yang ada pada lingkungan dan telah diirancang untuk memfokuskan dengan tujuan utama dalam wilayah dapat dicapai dengan berbagai macam pelaksanaan yang tepat oleh pemimpin. (jauch, 1994, hal. 12). Jadi strategi disini digunakan untuk pelepasan dari berbagai kondisi sehingga mampu menjadi perubahan yang di tuju atau juga sesuai dengan tujuan jangka panjang.

##### **2. Tahap - tahap Strategi**

Menurut Crown (Wahyudi, 1996, hal. 17) bahwa pada prinsipnya strategi dapat dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu:

#### a) Formulasi Strategi

Formulasi strategi adalah alat dalam menentukan berbagai aktifitas yang sedang berlangsung dan berhubungan dengan pencapaian dalam tujuan dan menetapkan bentuk strategi yang akan diterapkan.

#### b) Implementasi Strategi

Tahap implementasi merupakan suatu tahap di mana strategi yang telah diformulasikan lalu diimplementasikan, dan dimana tahap ini beberapa aktivitas kegiatan yang memperoleh penekanan sebagai mana yang telah dijelaskan Crown, antara lain:

- 1) Menetapkan tujuan tahunan.
- 2) Menetapkan Kebijakan.
- 3) Memotivasi karyawan,
- 4) Mengembangkan budaya yang mendukung.
- 5) Menetapkan struktur organisasi yang efektif.
- 6) Menyiapkan Budget .
- 7) Mendayagunakan sistem informasi.
- 8) menghubungkan Kompensasi karyawan dengan performance.

### 3. Tipe-tipe Strategi

Menurut Salusu dan Raymond young, mengemukakan satu defenisi yang lebih sederhana, yaitu: “Strategi ialah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai titik sasarannya yang melalui hubungannya efektif dengan lingkungan dalam berbagai kondisi yang paling menguntungkan”. 4 tipe pembagian strategi menurut Raymond dan salusu:

- a. Strategi dalam Organisasi
- b. Strategi dalam Program
- c. Strategi dalam Pendukung Sumber Daya
- d. Strategi dalam Kelembagaan (Maulidiana, Rena, 2010, hal. 21-22)

#### **4. Faktor-faktor Strategi**

Suatu strategi yang efektif dan jelas dapat menggerakkan organisasi pada tujuannya, sehingga harus memperhatikan beberapa faktor-faktornya sebagai berikut:

- a. Lingkungan
- b. Lingkungan organisasi
- c. Kepemimpinan. (Hendro, 2008)

#### **B. Politik**

Politik berasal dari bahasa Belanda yaitu *politiek*, dan secara etimologi kata "politik" masih memiliki hubungan dengan [polisi](#) atau [kebijakan](#). Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

- a. Politik adalah suatu bentuk jalan usaha yang dapat ditempuh oleh warga negara demi mewujudkan hasil dengan tujuan dan cita-cita bersama.  
(teori klasik Aristoteles)
- b. Politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- c. Politik merupakan titik kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan



dapat mempertahankan kekuasaan di dalam kehidupan bernegara.

### **C. Strategi Politik**

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan perumusan berbagai cita-cita dalam politik. Pengalamanyang telah membuktikan bahwa setiap tindakan yang tidak direncanakan dahulu secara cukup matang, baik oleh anggota politik maupun oleh pemerintah. Jika tidak demikian halnya, tidak mungkin ada begitu banyak proyek yang gagal. (Agusman), Peter Schroder (penerjemah Aviantie), 2010, hal. 26)

Karl Von Clausewitz mengemukakan strategi politik adalah tindakan dalam sebuah seni yang menggunakan sarana taktik untuk mencapai tujuan, sementara Martin Anderson turut menjelaskan bahwa strategi politik sebagai seni yang akan melibatkan berbagai kemampuan kemampuan dalam bentuk pemikiran yang akan membawa semua sumber daya yang telah tersedia untuk digunakan dan mencapai tujuan yang efisien. (Cangara, 2009, hal. 292)

Kemudian strategi dikembangkan oleh para praktisi kemudian menghasilkan berbagai ide baru dan konsepsi yang dilandasi oleh keilmuan masing-masing. Ilmuan politik juga turut mendefinisikan strategi di dalam pertempuran politik. Strategi politik seperti pada semua pertempuran pada umumnya, setiap orang berlaku akan sesuai dengan titik awal yang perlu dipahami lebih dahulu,terdapat pula kurang lebihnya suatu rencana yang sudah terolah dimana setiap orang membuat berbagai bentuk alat-alat untuk mencapai tujuan. (Cangara, 2009, hal. 293)

Perencanaan strategi dalam perubahan dan proses politik merupakan suatu analisa yang gamblang dari berbagai keadaan kekuasaan, dan gambaran yang jelas tentang tujuan akhir yang akan dituju dan pemusatan segala bentuk kekuatan untuk mencapai tujuan. Apabila pihak legislatif tidak mendukung eksekutif dalam melaksanakan kebijakan strategi melainkan hanya terus mempertanyakan tujuan dari kebijakan tersebut, tak perlu heran apabila banyak proyek yang gagal. Politisi yang disebut “baik” ini yang akan berusaha merealisasikan berbagai rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggungjawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita.

#### **D. Kepemimpinan**

##### **1. Pengertian Kepemimpinan**

Istilah kepemimpinan tidak dapat terlepas dari kata “memimpin” yang memiliki beberapa arti misalnya memegang tangan seseorang sambil berjalan (untuk menuntun ataupun menunjukkan jalan), mengetahui atau mengepalai (dalam rapat ataupun perkumpulan), memandu, melatih (mendidik, mengajari). Juga ada kata “terpimpin” yang berarti dapat dipimpin atau dapat terkendali, serta ada pula kata “pemimpin” yang memiliki dua arti: orang yang memimpin dan petunjuk, buku petunjuk (pedoman). (KBBI Kebudayaan, 1999, hal. 769)

Secara etimologi pemimpin adalah orang yang dapat atau mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar dapat melakukan suatu tindakan untuk pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi titik awal struktur dan pusat proses kelompok. Kemudian secara terminologis banyak pula ditemukan definisi tentang pemimpin. Para ilmuan

biasanya mendefinisikan pemimpin menurut pandangan pribadi mereka, serta dengan aspek-aspek fenomena dari kepentingan yang paling baik bagi pakar yang bersangkutan. (winardi, 1990, hal. 12)

Menurut Burns bahwa kepemimpinan diartikan sebuah proses hubungan timbal balik antara pemimpin dan pengikut dalam memobilisasi berbagai macam sumberdaya ekonomi politik dan sumber daya lainnya untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Gardner berpendapat bahwa kepemimpinan ialah suatu atau sekumpulan berbagai bentuk aktivitas yang teramati oleh pihak lain, dan berlangsung dalam kelompok, organisasi atau lembaga, dan melibatkan pemimpin dan pengikut yang akan bekerjasama untuk mewujudkan tujuan umum yang telah direncanakan. Sedangkan Hary S. Truman mengartikan bahwa kepemimpinan sebagai suatu kemampuan untuk memperoleh orang-orang agar mengabaikan apa yang tidak disukai dan melaksanakan apa yang disukai. (Thoha, 1995, hal. 63)

Pengertian Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang akan berhubungan dengan berbagai aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan bersama dan dengan kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara dan mengembangkan berbagai budaya organisasi. (winardi, 1990, hal. 47)

Menurut Sedarmayanti, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain baik melalui dirinya sendiri maupun dengan cara tertentu sehingga perilaku orang lain dapat berubah atau

tetap menjadi integratif. (Sedarmayanti, 2009, hal. 121) Sedangkan Alfian mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu bentuk proses dimana seseorang dapat memiliki pengaruh dalam satu kelompok atau organisasi untuk menggerakkan individu lain dalam meraih tujuan bersama. (M. Alfian Alfian, 2009, hal. 65)

Dari berbagai pengertian tentang kepemimpinan oleh para ilmuwan ini dapat ditarik satu pemahaman bahwa kepemimpinan adalah berhubungan dengan proses untuk mempengaruhi dari seseorang pemimpin kepada pengikutnya atau anggotanya guna untuk mencapai tujuan organisasi dimana terdapat seni mengatur, dan mengelola maupun mengarahkan orang dengan kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, kerjasama, semangat, dan potensi-potensi yang ada guna mencapai tujuan yang di cita-citakan.

## **2. Syarat-syarat Kepemimpinan**

Sebagai bagi pemimpin yang baik dan sukses, seorang pemimpin sangat dituntut untuk memiliki persyaratan sehat jasmani dan rohani, dan juga memiliki moralitas yang baik, memiliki rasa sosial ekonomi yang layak. (Abdul Aziz Wahab, 2008, hal. 136). Sedangkan adapula persyaratan kepribadian dari seorang pemimpin yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) Rendah hati dan sederhana
- 2) Bersifat suka menolong
- 3) Sabar dan memiliki kestabilan emosi
- 4) Percaya diri
- 5) Jujur, adil dan dapat dipercaya

6) Memiliki keahlian dan jabatan

### **3. Gaya Kepemimpinan**

Dalam kepemimpinannya, seorang pemimpin tentulah mempunyai berbagai macam sifat, kebiasaan, watak, serta kepribadian yang berbeda-beda. Perbedaan karakter ini;ah yang akan berpengaruh juga terhadap gaya kepemimpinan dalam memimpin wilayah perusahaan atau organisasinya. Effendy (1989:181) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam melakukan kegiatannya untuk membimbing, mengarahkan, serta mempengaruhi para pengikutnya atau bawahannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Anoraga (1992:7) mmengemukakan definisi tentang gaya kepemimpinan adalah suatu ciri seorang pimpinan dalam membimbing, mengarahkan, mempengaruhi, dan juga menggerakkan para pengikutnya dalam rangka mencapai tujuan.

Menurut Sutarto (2002), pendekatan perilaku berlandaskan pada pemikiran bahwa suatu keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh gaya bersikap dan bertindaknya seorang pemimpin yang bersangkutan. Gaya bersikap dan bertindak akan tampak dari : ( Edy Sutrisno, 2009, hal. 222)

1. Cara memberi perintah
2. Cara memberi tugas
3. Cara berkomunikasi
4. Cara membuat keputusan
5. Cara mendorong semangat bawahan
6. Cara memberi bimbingan

7. Cara menegakkan disiplin
8. Cara mengawasi pekerjaan bawahan
9. Cara meminta laporan dari bawahan
10. Cara memimpin rapat
11. Cara menegur kesalahan bawahan, dll.

Adapun gaya kepemimpinan yang ada, yaitu: ( Edy Sutrisno, 2009, hal. 223)

- a. Gaya persuasif, yaitu gaya memimpin dengan cara yang menggunakan pendekatan dengan perasaan, pikiran, atau dengan kata lain dengan melakukan ajakan atau bujukan.
- b. Gaya represif, yaitu gaya kepemimpinan dengan cara memberikan berbagai bentuk tekanan, ancaman, sehingga bawahan merasa tertekan dan terancam
- c. Gaya partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk aktif baik dalam mental, spritual, fisik, maupun materiil.
- d. Gaya inovatif, yaitu pemimpin yang selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan usaha-usaha pembaruan dalam berbagai bidang, misalnya bidang politik, ekonomi, sosial, budaya.
- e. Gaya motifatif, yaitu gaya kepemimpina yang mampu menyampaikan informasi dalam hal ide, program, dan kebijakan-kebijakannya kepada bawahan dengan baik. Komunikasi tersebut membuat ide, program dan kebijakan dapat dipahami oleh bawahan sehingga bawahan mau

merealisasikan semua ide, program, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin.

- f. Gaya edukatif, adalah gaya pemimpin yang mampu melakukan pengembangan bawahan dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan kepada bawahan, sehingga bawahan menjadi memiliki wawasan dan pengalaman yang lebih baik dari hari ke hari. Sehingga seorang pemimpin yang bergaya edukatif takkan pernah menghalangi bawahan yang ingin mengembangkan pendidikan dan keterampilan.

### **BAB III**

## **BIOGRAFI MOHAMMAD HATTA**

### **A. Profil Mohammad Hatta**

Mohammad Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 bertempat di Bukit Tinggi, sebuah kota kecil yang terletak di tengah dataran tinggi. Mohammad Djamil merupakan ayahnya yang meninggal saat itu ketika Hatta berusia delapan bulan, ayahnya berasal dari daerah batu hampar yang memiliki jarak kurang lebih 16 km dari daerah Bukit Tinggi ke arah Payakumbuh. Ibu Hatta bernama Saleha, Hatta memiliki enam orang saudara perempuan, Hatta adalah anak laki-laki satu-satunya. Mohammad Hatta memiliki nama Mohammad Athar, karena di lingkungan tempat tinggalnya sulit menyebut kata Athar, maka ia dipanggil "Atta" dan muncullah nama "Hatta". (Swasono M. F., 1980, hal. 5)



Gambar 3.1 Foto Mohammad Hatta  
Sumber: Pikiran Rakyat.com



Sejak kecil Hatta berkembang layaknya anak kecil biasa, akan tetapi di lingkungan sekitarnya ia tidak memiliki teman sebaya, karena tidak ada anak seusianya di lingkungan tempat tinggalnya. Sejak kecil Hatta sudah memiliki sifat yang hemat, terlihat ketika orang tuanya memberikan uang, maka akan di tabunginya dengan cara menyusun uang logam pertumpun berisi 10 uang logam di atas mejanya. (Hatta, 1980, hal. 2)

Sebagai seorang muslim, sejak kecil ia sudah rajin sembahyang, yang mulanya belajar di lingkungan keluarga, hingga beranjak remaja ia sudah mulai belajar di Surau dengan bimbingan guru ngaji. Hatta tidak pernah melewatkan sembahyan dan puasa, dan ada satu hal unik yang menjadi kebiasaan Hatta sejak kecil yaitu dimanapun ia berada ia akan selalu membawa buku, dimana seperti yang sudah dikisahkan buku sudah menjadi bagian dari hidupnya. (Hatta, 1980, hal. 4)

Lalu dalam hal bersekolah, Hatta menempuh beralinan dari niat yang dikandung keluarga ayahnya di Batu Hampar. Keluarga ayahnya menginginkan agar Hatta melanjutkan pelajaran Agama bila telah menyelesaikan sekolah Rakyat 5 tahun, maksud mulanya ke Mekkah, kemudian Mesir. Untuk keperluan ini persiapanpun dilakukan, tetapi setelah dua tahun belajar di sekolah rakyat Bukittinggi, Hatta pindah ke sekolah Belanda ELS (Europeesche Lagere Scholl-Sekolah dasar untuk orang-orang kulit putih) dikota itu juga, kemudian ke ELS Padang (mulai kelas 5 sampai kelas 7). Kepindahan ke padang ini, yang terjadi tahun 1913, disebabkan oleh keinginan pihak keluarga ibu agar Hatta memperoleh

pelajaran bahasa Perancis (disamping bahasa Belanda) yang mulai diajarkan di kelas 5.

Ketika di Bukittinggi Hatta telah mulai belajar bahasa Prancis tetapi masih juga bersifat privat, sedangkan sekolah yang di Padang pelajaran itu diberikan dalam rangka kurikulum. Sekolah di ELS ini diselesaikan Hatta tahun 1917. Maksudnya akan meneruskan studi ke HBS (Hogere Burger Scholl-Sekolah menengah Belanda lima tahun), dan ia memang telah lulus ujian masuk disini. Akan tetapi ini berarti bahwa ia harus pindah ke Jakarta, dan terhadap ini ibunya keberatan. Hatta memang baru berumur 14-15 tahun ketika itu. Oleh sebab itu, ia beralih ke MULO yang tamat pada tahun 1919. ada juga godaan pada Hatta untuk bekerja selesai ELS di Padang, malah ia diterima untuk bekerja pada kantor pos dengan gaji 65 gulden sebulan. Namun, niat ini dibatalkan atas bujukan ibunya. (Salim, 1998, hal. 17)

Ketika pecah perang Balkan, Hatta yang waktu itu masih belajar di sekolah Rakyat di Bukittinggi. Kawan-kawan Hatta yang berkulit putih semuanya menentang turki sehingga pendapat diantar anak-anak yang masih kecil itu terbagi menurut bangsa dan agama. Apalagi surat kabar, senaja menunjukkan penghinaan tempat khilafah itu. Namun kesadaran politik dalam diri Hatta mulai berkembang setelah ia sekolah di MULO dan terutama dalam kedudukannya sebagai pelajar yang mulai mengenal JSB dan kemudian menjadi anggota pengurus perkumpulan ini. Ia menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik yang diadakan oleh tokoh-tokoh lokal.

Pengenalan tentang perkembangan masyarakat, termasuk politik, diperoleh Hatta dari pergaulannya dengan para aktivis Serikat Usaha, semacam kamar dagang lokal tempat pedagang-pedang Bumiputra berkumpul dan bekerjasama untuk memajukan usaha mereka. Terutama dengan Taher Marah Sutan, sekretaris badan ini, ia bergaul rapat. Darinya Hatta memperoleh pengaruh tentang cara-cara kerja yang penuh akan kedisiplinan. Disiplin ini dipupuknya lebih intensif ketika ia bersekoah di Prins Handels School di Jakarta seusai menamatkan studinya di MULO Padang. Sekolah dagang ini katanya menumbuhkan sifat dan cara yang “cepat, tepat, dan teratur”.

Di kantor Serikat usaha itu Hatta memperoleh pula kesempatan untuk membaca berbagai koran, bukan saja terbitan padang, melainkan juga terbitan jakarta. Disini ia mulai mengenal tulisan Tjokroaminoto (antara lain dalam surat kabar Utusan Hindia) dan Haji Agus Salim (dalam Neratjha), termasuk komentar mereka tentang perdebatan di Dewan Rakyat (Volksraad) di mana Moeis dan Tjikroaminoto menjadi anggota (1918-1921). Masa-masa tersebut memang bagai menggerakkan rakyat indonesia untuk sadar akan hak-haknya. Malah juga dewan rakyat dikecam setelah berdiri karena tidak sesuai dengan janji yang diberikan Belanda untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat yang sesungguhnya. Yak lama sesudah dewan rakyat berdiri, Tjokroaminoto berhasil mengegolkan mosinya agar dibentuk suatu dewan perwakilan rakyat yang sesungguhnya di Indonesia, tempat pemerintah mempertanggungjawabkan kebijaksanaanya.

Dalam membaca segalanya ini taher merah sutan serta sutan said Ali merupakan tempat bertanya bagi Hatta. Taher merah sutan pun memberikan

informasi kepada Hatta tentang seluk-beluk perdagangan yang dijalankan oleh kalangan bumiputra, berhadapan dengan pihak China dan Belanda. Masa itu yang merupakan masa remaja Hatta (ia meninggalkan padang dalm umur 17 tahun) mengisi pribadinya dengan seluk-beluk permasalahan masyarakat jajahan, suatu beban yang menyebabkan Hatta lebih cepat dewasa. (Noer, 2018, hal. 13-22)

Kemudian ia Hatta memperoleh kesempatan bersekolah di Jakarta di Prins Hendrik Handels School (PHS) TAHUN 1919-1921 dipergunakan Hatta untuk meningkatkan diri dalam pengenalan seluk-beluk masyarakat jajahan itu kini pada tingkat nasional. Studinya di PHS itu sendiri ia selesaikan dengan tertib, umunya juga tanpa kesulitan. Hatta merasakan pengembangan pemikiranya dengan cara-cara para guru di PHS memberikan pelajaran yang lebih mengutamakan pengembangan dan bukan penghafalan. Seperti telah dikemukakan diatas di sekolah ini pula ia meningkatkan disiplin diri. Dan pada tahun 1921 ia menyelesaikan studinya di PHS dengan menempati urutan ketiga. Pada saat itulah ia kembali cenderung terpengaruh oleh godaan untuk bekerja dengan gaji permulaan f 350. Guru-gurunya di PHS pun kecuali seseorang menganjurkan agar ia segera saja mempraktikan pengetahuan yang diperoleh selama di sekolah.

Hatta memutuskan untuk melanjutkan studinya ke luar negeri Belanda. Walaupun paman-Nya Ayub Rais yang menjanjikan bantuan kepadanya telah jatuh pailit, ia akan berusaha dengan bekal yang ada, dan ia juga mengharapkan bantuan berupa beasiswa dari pihak Belanda. Dan Akhirnya pada tahun 1921 Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar imu perdagangan (Rose, 1990, hal. 17)

Kemudian pada tahun 1923 Hatta lulus dalam ujian Handels-Economie. Mula-mula Hatta bermaksud akan menempuh ujian doktoral ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Akan tetapi pada tahun 1925 di Rotterdam diadakan cabang baru dalam pelajaran doktoral, yaitu “Staatskunding-Economische richting” di mana hukum negara dan hukum administratif menjadi konsentrasi utama disamping ekonomi, maka Hatta pun tertarik untuk memasuki jurusan baru tersebut. Menurut pendapatnya, ia tidak akan rugi kalau menyambung lagi pelajarannya yang hampir tamat itu ke jurusan yang baru.

Dengan memperpanjang studi satu atau satu setengah tahun lagi, ia akan memperoleh perlengkapan yang lebih sempurna untuk menjalankan kewajibannya terhadap tanah air dimasa datang, dan ia merencanakan akan menempuh ujian doktoralnya pada akhir tahun 1926 atau awal tahun 1927.<sup>8</sup> Akan tetapi, karena kesibukan sangat padat, Hatta baru menyelesaikan studinya pada pertengahan tahun 1932. Iapun menyadari bahwa hambatan terhadap pergerakan nasional di Indonesia akan sangat besar, apalagi ia bersikap non-koperasi. Ia secara pribadi akan menghadapi hambatan itu, yang lebih besar daripada yang pernah dihadapinya di negeri Belanda. Suasana ekonomi kolonial memang berada daripada di negeri dingin tersebut. ( Mohammad Hatta, 2002, hal. 12)

Baik ketika sampai di Singapura maupun ketika tiba di Tanjung Priok, suasana kolonial tersebut ia hadapi. Di Singapura ia dibuntuti terus oleh polisi rahasia ke manapun ia pergi, padahal ia hanya singgah kepada kenalan secara bersilaturahmi saja dan melihat-lihat kota. Di Tanjung Priok inspektur polisi telah menanti untuk memeriksa barang-barangnya, terutama buku-buku dan bacaan lain

yang ia bawa. Oleh karena bahan-bahan bacaan ini banyak, (sebanyak 16 peti besi, tiap peti berukuran setengah meter kubik), pihak polisi tidak dapat memeriksanya segera. Baru tiga hari kemudian pemeriksaan dilakukan, semua bisa lolos kecuali majalah Indonesia Merdeka. Majalah ini memang dilarang masuk Indonesia. Namun, majalah ini oleh Hatta telah lebih dulu diselundupkan kepada kawan-kawannya yang berkerja sebagai tukang mesin pada kapal-kapal Rotterdams Lloyd ke Indonesia. Tanpa istirahat lebih dulu, ia segera aktif dalam pergerakan. (Hatta, Mohammad, 1971, hal. 24-25)

Kemudian setelah bertahun-tahun Hatta aktif dalam dunia pergerakan sampai pada akhirnya ia menjadi wakil presiden, selama menjadi wakil presiden Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah dibidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya.

Tanggal 12 Juli 1952, Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut hari koperasi di Indonesia pada kongres koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul “Membangun koperasi dan koperasi membangun”.

Pada tanggal 27 Nopember 1956 ia memperoleh gelar kehormatan Akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Pada kesempatan itu Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul “Lampau dan datang” setelah Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI Hatta memperoleh beberapa gelar akademis dari berbagai

perguruan tinggi antara lain, Universitas Padjajaran di Bandung mengukuhkan Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian, Universitas Hasanudin di Ujung Padang juga memberikan gelar Doctor Honoris Caousa dalam bidang ekonomi, Universitas Indonesia juga memberikan gelar Doctot Honoris Causa di Bidang ilmu hukum. (Noer, 2018, hal. 21)

Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal 18 November 1945 di desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Ferida, Gemala Rabiah, dan Halidah Nuriah. Hatta seorang proklamator kemerdekaan dan Wakil Presiden pertama RI, ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di RS DR. Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980. (Hatta, Mohammad, 1971, hal. 45)

## **B. Pendidikan Mohammad Hatta**

Selama 5 tahun Hatta bersekolah di Sekolah rakyat, dan pada malam hari waktunya ia gunakan untuk belajar mengaji di surau Inyik Djambek. Sejak kecil Hatta sekolah di Belanda, Hatta menyelesaikan pendidikan Dasarnya di Europese Lagere School (ELS) di Bukittinggi pada tahun 1916. Menginjak tahun kelima, Hatta pindah ke ELS Padang agar bisa mempelajari Bahasa Prancis. Lulus dari sekolah Belanda pertama, Hatta berniat melanjutkan pendidikan ke HBS (Hogere Burgere School) atau sekolah menengah lima tahun. HBS bertempat di Jakarta, namun ibunda Hatta tidak mengizinkan pergi ke Jakarta karena Hatta dianggap masih terlalu muda (Alfarizi, 2009, hal. 6).

Hatta melanjutkan ke *Uitgebreid Lagere School (MULO)* di Padang pada tahun 1919. Pada tahun 1921, Hatta menyelesaikan Pendidikan di *Handle Middlebare School (Sekolah Menengah Dagang)* di Batavia. Hatta melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi di *Nederland Handels Hoge School* di Rotterdam, Belanda (Alfarizi, 2009, hal. 17).

Pada tahun 1925, Hatta melanjutkan ke jurusan Ilmu Hukum Konstitusi. Hatta saat berusia 17 tahun, setelah lulus dari MULO, Hatta melanjutkan pendidikan di *Handel Middlebare School (Sekolah Menengah Dagang)* di Batavia. Usai menyelesaikan Sekolah Menengah Dagang pada tahun 1921, Hatta melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi di *Nederland Handels Hooge School*, Rotterdam Belanda. Ketika menjadi mahasiswa Hatta mulai aktif menulis, karangannya yang pertama Berjudul *Namaku Hindania* yang dimuat dalam majalah *Jong Sumatera* (Alfarizi, 2009, hal. 17-18)

Hatta lulus dalam ujian *Handels Economie* Pada tahun 1923, Hatta bermaksud ingin menempuh ujian doktoral ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Pada tahun 1925 Hatta tertarik mengambil jurusan yang baru dibuka pada cabang baru dalam pelajaran Doktoral yaitu *Staatskundig Economische Righting*, pelajaran utamanya mengenai hukum negara dan Hukum administratif.

Hatta semasa kuliah selain mengikuti mata Kuliah ekonomi juga sering mengikuti mata kuliah tambahan dari Profesor Oppenheim tentang Ilmu Tata Negara. Pengetahuan Hatta yang luas tentang perekonomian, hukum, serta ketatanegaraan mampu mempengaruhi peranan Hatta dalam proses penyusunan



UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949), dan UUDS 1950 (Alfarizi, 2009, hal. 20)

### **C. Karir Mohammad Hatta**

Hatta berusia 15 tahun merintis sebagai aktivis organisasi, menjabat sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond (JBS) yang bercabang di Padang. Hatta mulai menetap di Belanda pada September 1921, dan telah bergabung menjadi anggota Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Organisasi Indische Vereeniging telah berdiri sejak tahun 1908, merupakan perkumpulan pelajar dari Hindia Belanda yang belajar di negeri Belanda. Tiga tokoh Indische Partij yang memulai mewarnai pergerakan Indische Vereeniging yaitu Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusomo pada tahun 1913 akibat kritik mereka melalui tulisan di koran Express. Kondisi disaat Suwardi Suryaningrat mengeluarkan kritikan terhadap sikap kolonial Belanda yang diterbitkan oleh majalah Hindia Poetra oleh Indische Vereeniging sejak tahun 1916.

Hatta mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi pergerakan pada tahun 1922 melalui Indische Vereeniging yang berganti nama menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia) pada tahun 1925. Hatta diangkat menjadi bendahara PI pada 19 Februari 1922 berturut-turut sampai tahun 1925. Hatta mengusulkan agar perkumpulan mempunyai majalah sendiri yang terbit secara teratur. Hatta mengembangkan karier dan keahliannya dalam menulis dengan menekuni dunia pers. Hatta menjadi anggota Dewan Redaksi pada “Hindia Poetra“ di negeri Belanda serta pada Majalah “ Daulat Ra’jat “di Betawi setelah Hatta pulang dari Belanda (Widjaja, 1987, hal. 282).

Tulisan pertama Hatta pada surat kabar *Neratja* di Batavia,. Serial tulisan Hatta mengundang perhatian banyak orang, bahkan surat kabar tanah air banyak yang mengutip tulisan-tulisan Hatta. Tulisannya yang mengundang perhatian adalah peristiwa ketika Turki sebagai kerajaan yang runtuh memukul mundur tentara Yunani yang didukung Inggris. Hatta terpilih menjadi ketua PI pada 17 Januari 1926-1930 Karena perannya yang mencolok. Selama di negeri Belanda Hatta melakukan kontak dengan pemimpin pergerakan dunia seperti Jawaharlal Nehru dari India.

Hatta saat menjadi ketua PI berkesempatan menyampaikan pidato berjudul *Economische Wereldbouw en Machtstgenstellingen* (Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan). Hatta giat berusaha memperkenalkan cita-cita kemerdekaan di negeri Belanda dan negara-negara lain seperti Belgia, Perancis, dan Jerman. Organisasi PI menjadi suatu perkumpulan politik yang banyak mempengaruhi politik rakyat di Indonesia sehingga PPPKI mengakui PI sebagai pergerakan nasional di Eropa. Perhimpunan Indonesia aktif melakukan propaganda ke luar negeri untuk cita-cita Indonesia Merdeka. Hatta banyak memimpin delegasi, dalam kongres internasional Hatta mengenal pemimpin-pemimpin kaum buruh, demokrasi, dan perdamaian baik di Eropa maupun di Asia (Widjaja, 1987, hal. 283)

Hatta ingin memperkenalkan nama “Indonesia” pada dunia internasional sebagai tujuannya dengan memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Internasional untuk perdamaian dunia di Bierville, Prancis. Pada 10-15 Februari 1927, Hatta menjadi wakil delegasi Indonesia dalam Liga Menentang

Imperialisme dan Penindasan Kolonial yang diadakan Di Brussel, Belgia. Hatta menerbitkan tulisannya *De Socialist* pada Desember 1928 untuk memperkenalkan Nama “Indonesia”. Hatta sebagai seorang politikus dan pemuda yang kritis, maka perlu adanya tambahan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya serta tanah air di masa mendatang. Hatta berencana menempuh ujian doktoral antara tahun 1926-1927.

Hatta selain menjadi proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama Ir. Soekarno, pejuang pergerakan dan pemikir yang visioner. Hatta dipandang banyak kalangan sebagai peletak dasar konsep keadilan, keterbukaan, dan demokrasi. Pemikirannya yang paling monumental adalah membangun demokrasi ekonomi kerakyatan dan menemukan bentuk yang ideal yaitu koperasi. Pemikiran Hatta tersebut diberikannya gelar Bapak Koperasi Indonesia. Belanda menjadi tempat yang memberikan banyak pengalaman bagi Hatta.

Hatta berada di negeri Belanda mulai umur 20 sampai 31 tahun. Pengalaman Hatta yang tidak terlupakan ketika Hatta memimpin PI dengan cita-cita meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Aktivitas PI sangat besar pengaruhnya terhadap pergerakan rakyat Indonesia, maka pemerintah Belanda mengambil tindakan tegas. Hatta beserta tiga orang pengurus lain ditangkap dan ditahan dalam penjara. Mahkamah Deh Haag memberikan kebebasan kepada mereka dari segala tuntutan pada 22 Maret 1928. Hatta merasa sudah saatnya jabatan sebagai ketua PI digantikan oleh yang muda-muda.

Abdullah Sjoekoer yang terpilih untuk menggantikan Hatta pada 1930. Aktivitas Hatta semakin aktif dalam menerbitkan majalah *Daulat Ra'jat*, Hatta aktif membantu menyumbangkan tulisannya yang berisi pendidikan politik,

semangat perjuangan dan semangat tahan uji. Hatta mengalami keterlambatan Kelulusan,halini dikarenakan aktivitas politik Hatta yang pada akhirnya pada tahun 1932 Hatta dapat menyelesaikan studinya di Rotterdam. Hatta selama 11 tahun meninggalkan tanah airnya. Pengalaman yang banyak di dapat Hatta dari negeri Belanda, Hatta memperoleh basis teori yang kuat serta kesempatan mempelajari banyak aliran politik internasional. Pengalaman tersebut sangat berharga bagi Hatta untuk melaksanakan kewajibannya pada tanah air di masa mendatang.

Hatta kembali ke Indonesia disibukkan dengan masalah-masalah politik, masalah pembubaran PNI . Hatta bersama Sjahrir mendirikan Partai Pendidikan Nasional Baru (PNI Baru) yang perjuangannya difokuskan kepada mendidik kader-kader perjuangan politik. Selama menjabat sebagai Ketua partai, Hatta aktif menangani majalah Daulat Ra'jat (1934-1935). Perjuangan Hatta dalam memimpin PNI Baru hanya berlangsung kurang dari satu setengah tahun. Hatta ditahan oleh pemerintah Belanda selama 10 tahun (Alfarizi, 2009, hal. 22)

Perjalanan Hatta ditahan sangat panjang, pada tahun 1934 Hatta ditahan dipenjara di Glodok Jakarta selama 11 bulan. Pada Desember 1934 dibuang ke Boven Digoel, Papua Barat, dan satu tahun kemudian dipindahkan ke Banda Neira (1935-1942). Pada Februari 1942 dipindahkan ke Sukabumi saat tentara Jepang mendarat di Ambon. Hatta setelah bebas dari hukuman, kemudian aktif dalam organisasi tanah air. Hatta terlibat dalam pembentukan BPUPKI pada Mei 1944. Hatta aktif mengikuti sidang-sidang BPUPKI, dan Hatta juga engetahui perihal

lahirnya Pancasila. Hatta juga ikut serta dalam pembentukan PPKI pada 1945 (Swasono S. E., 1985, hal. 70)

Keterlibatan Hatta dalam berbagai organisasi, mengantarkan Hatta menjadi seorang proklamator Kemerdekaan RI bersama Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945, Hatta diangkat menjadi Wakil presiden RI mendampingi Ir. Soekarno. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Hatta tetap aktif mencari dukungan hingga dunia internasional untuk mendukung Indonesia menjadi negara merdeka. Setelah perjalanan memimpin pemerintahan Indonesia yang panjang tersebut, Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi wakil presiden RI pada 1 Desember 1956 (Alfarizi, 2009, hal. 32).

Kemunduran Hatta menjadi wakil presiden RI, membuat Hatta mempunyai waktu yang lama untuk fokus pada kegiatan keilmuan dan akademis. Pada tahun 1951-1959, Hatta menjadi dosen di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat di Bandung. Tahun 1954-1961 mengajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 1966-1971 menjadi guru besar luar biasa di Universitas Hasanuddin, Ujungpandang. Tahun 1967-1971 menjadi guru besar luar biasa pada Universitas Padjajaran, Bandung. Pada tahun 1969, ditunjuk oleh Presiden RI menjadi penasehat Presiden dan penasehat Komisi Empat mengenai masalah korupsi. Pada tahun 1975 menjadi ketua Panitia Lima (Panitia Pancasila) Dengan tugas memberikan penafsiran tunggal mengenai Pancasila.

Mohammad Hatta diberi gelar doctor honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada pada 27 November 1956, dengan pidato pengukuhan yang berjudul "Lampau dan Datang". Hatta juga dikukuhkan sebagai guru besar dalam

ilmu politik perekonomian Oleh Universitas Padjajaran, Bandung. Universitas Hasanuddin, Makasar memberikan gelar doctor Honoris causa pada bidang ekonomi. Universitas Indonesia (UI) memberikan gelar doctor honoris causa Pada bidang ilmu hukum (Swasono S. E., 1985, hal. 71).

Mohammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Hatta Wafat pada usia 77 tahun, dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada 15 Maret 1980. Hatta mendapatkan Anugrah gelar Pahlawan Proklamator sesuai keputusan Presiden RI No.081/TK/Tahun 1986. Pada 15 Agustus 1972 Presiden Soeharto, menganugrahkan kepada Hatta berupa tanda kehormatan tertinggi “Bintang Republik Indonesia Kelas I” (Alfarizi, 2009, hal. 33).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, peneliti akan menganalisa berbagai strategi politik yang dilakukan oleh Mohammad Hatta dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia yang mengalami krisis ekonomi. Strategi politik diartikan sebagai suatu tindakan yang digunakan pemimpin untuk merealisasikan cita-cita politiknya, misalnya mulai diberlakukannya peraturan baru, dibentuknya struktur baru dalam pemerintahannya, atau mulai menjalankan berbagai program deregulasi, privat atau desentralisasi.

#### **I. Keadaan Perekonomian Indonesia Setelah Kemerdekaan**

Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Negara Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintahan Indonesia mengeluarkan beberapa maklumat kenegaraan yang mengubah kondisi elit pada saat itu. Maklumat pertama ialah maklumat no X tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi tentang pembentukan Komite Nasional (KNIP) sebagai institusi kelembagaan legislatif sebelum terbentuknya DPR dan MPR, maklumat kedua berisi tentang pembentukan partai-partai pada tanggal 3 November 1945.

Anggota pro kemerdekaan Indonesia yang telah memiliki banyak kesempatan untuk memiliki karir di sektor sipil kelembagaan yang akan menjadi sebab dikeluarkannya maklumat-maklumat yang telah dijelaskan. Perjuangan akan mereka tempuh dengan melalui birokrasi, parpol, menteri kabinet serta Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Cabang pertama yang diisi memilih fokus pada jalur diplomasi dengan berbagai tindakan untuk melawan Belanda

yang berada di meja perundingan. Dan cabang kedua mulai terlihat dengan dibentuknya para elit baru yang berada pada kalangan militer berada di medan pertempuran (Kahim, 1995, hal. 154)

Untuk memastikan keberadaan Jepang yang telah hengkang dari Indonesia, dan keadaan Belanda yang tidak bisa menginjakkan kaki kembali di Indonesia, Jendral Sudirman, Urip Sumarjo, Nasution, TB Simatupang mereka memiliki latar belakang militer yang berbeda-beda yakni Akademi Militer Belanda, PETA, dan Laskar Perjuangan Rakyat, tetapi persatuan tetap terjalin untuk menghalangi dan melawan penjajah yang ingin kembali ke Indonesia. (Ricklefs, 2001, hal. 168)

Pada fase ini nuansa konflik yang lebih luas mulai satu demi satu merasuk dalam aktivitas politik elit Indonesia. Di sektor sipil cara berfikir kepartaian yang cenderung mengedepankan kepentingan kelompok mulai mendominasi. Hanya karena perbedaan pandangan dalam menyelesaikan masalah politik atau diplomasi dengan pihak Belanda, Kabinet bisa bubar, dan mandat harus segera dikembalikan oleh PM kepada Presiden. Tercatat pada fase ini (1945-1949) terjadi pergantian kabinet sebanyak delapan kali, “hanya” karena hal sepele yaitu ketidaksepakatan partai partai elemen pemerintah. Ini berarti rata rata satu kabinet hanya berusia sepuluh bulan (Kahim, 1995, hal. 157)

Namun meskipun demikian, perpolitikan Indonesia pada fase ini memiliki faktor Sukarno-Hatta yang begitu kuat, sehingga setiap kali gonjang-ganjing politik yang mengakibatkan bubarnya kabinet, mandat tetap bisa dikembalikan kepada mereka tanpa kisruh berkepanjangan, dan mandat itu bisa diberikan



kembali ke kabinet selanjutnya. Faktor yang tidak pernah terulang, setidaknya sampai saat ekarang, adalah wibawa kepala negara, presiden dan wakil presiden begitu melembaga, dan membuat variabel politik lain akan segera ikut dalam determinan kepala negara bila terjadi Instabilitas politik (Ricklefs, 2001, hal. 173)

## **B. Strategi Politik Mohammad Hatta Terhadap Perekonomian Indonesia**

Mohammad Hatta memiliki pemikirannya sendiri tentang jalan perekonomian yang dialami Indonesia, Hatta mampu membangun ekonomi bangsa Indonesia dengan berbagai pemikirannya yang diatur dalam strategi. Dalam menjalankan strategi politik yang efektif tentu saja memiliki beberapa faktor yang memengaruhinya misalnya lingkungan tempat tinggal, yang tentunya tak selalu berada pada titik kondisi dan selalu berubah atau fleksibel yang juga mempengaruhi sikap dan pola pikir dan juga kepemimpinan dimana menjadi faktor yang terpenting karena menjadi titik dari pola pikir dari karakteristik kepemimpinannya akan mempengaruhi strategi.

### **1. Pemikiran Demokrasi Ekonomi Mohammad Hatta**

Demokrasi ekonomi Mohammad Hatta sebelumnya dikenal dengan istilah kedaulatan rakyat dengan bahasa Belanda dikenal dengan *Volkssouveriniteit*, penggunaan istilah ini terlihat dalam kutipan yang disampaikan oleh Hatta dalam tulisannya:

*“sebab itu ada baiknya kalau saya ini berkata sepatah kata tentang kedaulatan rakyat itu. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat dengan cara mufakat. Kata mufakat mestilah ada, barulah kedaulatan ini ada pada rakyat. putusan diambil oleh seseorang atau golongan saja dengan tidak ada persetujuan rakyat, bukanlah kedaulatan rakyat. Demikian juga kata mufakat yang dipaksakan kepada*

*rakyat*” (dikutip dalam buku Mohammad Hatta Koperasi membangun dan Membangun Koperasi, Tahun 1971 halaman 171).

Dari hasil kutipan di atas penulis menganalisa bahwa demokrasi ekonomi memang berasal dari pemikiran Hatta sendiri, dengan adanya demokrasi ekonomi ini barulah ada terjaminnya keadilan dalam kehidupan sosial yang dikehendaki rakyat untuk kemakmuran bersama, namun demokrasi ekonomi yang Hatta keluarkan bukanlah yang dipraktekkan dalam negara Barat. Selanjutnya melalui strategi demokrasi ekonomi inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Keadilan sosial memang menjadi tujuan utama dalam strategi demokrasi ekonomi ini, menurut Hatta yang terinspirasi tiga hal yakni dari paham sosialis yang dikemukakan oleh karl marx dimana dasar-dasar kemanusiaan dan sosialisme yang menjadi tujuannya dan dilakukan sebagai usaha secara bersama-sama oleh orang banyak dan untuk orang banyak yang berada dalam pimpinan badan-badan masyarakat.

## **2. Pemikiran Koperasi Mohammad Hatta**

Koperasi berasal dari kata-kata “ko”, yang artinya “bersama” dan “operasi”, yaitu bekerja. Jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama koperasi ialah perkumpulan kerjasama dalam mencapai sesuatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja memeluk tangan, semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.

Gagasan koperasi yang dicetuskan Hatta sebagai bentuk organisasi ekonomi rakyat Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan koperasi di Denmark

yang dikaitkannya dengan kehidupan demokrasi politik di negara itu. Hatta tampaknya mempunyai pandangan yang sama dengan Ravnholt bahwa dasar-dasar demokrasi ekonomi yang dijalankan dalam perkumpulan koperasi akan menjadi landasan utama bagi kehidupan demokrasi politik. Dalam pidato radionya untuk menyambut hari koperasi yang ketiga pada tanggal 11 Juli 1953, Hatta mengutip pernyataan:

*“Dalam perkumpulan koperasi, dasar-dasar ekonomi telah terlebih dahulu telah lebih dahulu dijalankan sebelum rakyat Denmark seluruhnya mengenal demokrasi politik”*(Ravnholt yang dikemukakannya dalam bukunya *The Danish Co-operative Movement*).

Hatta sebagai seorang demokrat tampaknya sangat terpengaruh dengan adanya kaitan antara perkembangan koperasi dengan demokrasi politik di Denmark oleh karena koperasi memupuk rasa tanggung jawab rakyat. Hatta beranggapan bahwa tanpa rasa tanggung jawab pada rakyat tak mungkin ada demokrasi. Demokrasi mungkin ada, tetapi hanya namanya saja sedangkan isinya adalah anarki yang memperlihatkan keinginan yang bersimpangan yang didasarkan atas kepentingan sendiri atau golongan. Menurut Hatta, koperasi dan demokrasi bersifat saling menunjang. Koperasi mempertebal rasa tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi dan demokrasi yang berakar baik bagi kehidupan koperasi.

Hatta menjelaskan bahwa dalam koperasi terdapat suatu tujuan yang utama yaitu menyelenggarakan keperluan hidup bersama dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki nasib orang-orang yang lemah ekonominya dengan jalan kerjasama. Dalam menguraikan tujuan koperasi, Hatta menganalogikan bahwa antara satuindividu dengan individu yang lain seperti sebuah sapu lidi, yang mana kalau

lidi itu berjalan sendiri-sendiri menjadi lemah dan mudah dipatah. Tetapi apabila diikat menjadi sapu, ia merupakan satu kesatuan yang kuat dan tak mudah dipatah. Oleh karena itu tidak seperti sebuah badan usaha pada umumnya, koperasi tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan layaknya firma dan perseroan. Walaupun pada akhirnya koperasi memperoleh keuntungan, namun keuntungan itu bukanlah suatu tujuan. Wujud koperasi, seperti disebutkan tadi, ialah membela keperluan orang kecil. Mencapai keperluan hidup dengan ongkos semurah-murahnya, itulah tujuannya bukan keuntungan.

Selain itu, Hatta juga menjelaskan bahwa dalam koperasi terdapat asas kolektivisme. Kedudukan anggota yang satu dengan anggota yang lain sejajar dan sama rata oleh karena itu dalam koperasi tak ada majikan dan buruh, semuanya adalah pekerja yang bersama-sama bekerja untuk menyelenggarakan keperluan bersama. Dalam memberikan penjelasan mengenai asas kolektivisme dalam koperasi, Hatta juga menganalogikan koperasi sebagai sebuah persekutuan keluarga, yang mana antara anggota yang satu dengan anggota yang lain mempunyai tanggung jawab yang sama dalam memajukan koperasi tersebut. Sebagaimana keselamatan keluarga banyak bergantung kepada kesadaran dan cita-cita dan keluhuran budi dari anggota koperasi seluruhnya. Koperasi hanya bisa maju dengan cita-cita yang hidup dalam jiwa anggotanya, cita-cita yang berdasar keyakinan bahwa masyarakat Indonesia harus dibangun selekas-lekasnya dengan usaha gotong-royong.

Berdasarkan asas kolektivisme inilah, dalam koperasi para pengurusnya tidak mendapat gaji. Hanya penjabat dan pekerja penuh sehari-hari saja yang

memperoleh gaji. Ia (para pengurus koperasi) hanya memperoleh ongkos transport atau uang sidang yang diberikan ketika ia menghadiri sidang. Sementara waktu sidang itu mungkin hanya dilangsungkan sekali dalam seminggu-dua minggu, atau diadakan apabila terdapat masalah-masalah luar biasa yang harus dipecahkan. Dengan dasar kolektivisme tersebut, Hatta berpendapat bahwa koperasi adalah suatu bentuk yang ideal untuk menggerakkan ekonomi rakyat.

Menurut Hatta, pembangunan koperasi tidak pernah dimulai dari seorang professor, seorang dokter, seorang hartawan dan orang-orang pandai lainnya yang sudah mempunyai dasar hidup yang bahagia bagi diri dan keluarganya. Menurut Hatta pembangunan koperasi dimulai oleh kaum buruh miskin, tani miskin dan para tukang yang miskin. Mereka terpesona oleh cita-cita koperasi yang dilukiskan oleh orang-orang pandai, yang akan membawa kemakmuran bagi mereka, tetapi mereka sadar, bahwa pembangunan koperasi itu tidak akan dapat dinanti-nantikan sebagai hasil usaha orang-orang hartawan dan dermawan.

Mereka bulatkan tekad untuk memulainya sendiri, mengumpulkan uang pokok sedikit demi sedikit,150 dengan uang yang terkumpul tersebut, maka koperasi dapat membeli sekali banyak barang dagang. Karena membeli sekali banyak, koperasi memperoleh potongan harga dan potongan itu menjadi keuntungan bagi anggota dan segala orang yang berbelanja pada koperasi itu. Pada toko-toko lain, keuntungan jatuh pada ke tangan yang empunya. Si pembeli tidak dapat mendapat apa-apa. Pada koperasi yang menjual menurut harga pasar, segala keuntungan habis tahun dibagikan kepada anggota dan orang lain yang

membeli pada toko koperasi itu, menurut besarnya jumlah pembelian masing-masing.

Lalu Hatta juga menyatakan bahwa koperasi terdiri dari dua sendi, sendi solidaritas dan sendi individualitas. Kerjasama adalah dasar dari sebuah koperasi, karena itu rasa solidaritas harus ada padanya. Selain dari rasa solidaritas, koperasi juga menghendaki individualitas, yaitu kesadaran akan harga diri sendiri pada anggotanya. Karena hanya anggota yang sadar akan harga dirinya akan bertindak dengan memberi harapan, untuk mencapai dan membela kepentingan bersama.

Sadar akan harga diri sendiri menimbulkan kepercayaan atas kemampuan diri sendiri untuk bertindak, dengan memberi harapan, untuk mencapai dan membela kepentingan bersama. Sadar akan harga diri sendiri menimbulkan kepercayaan atas kemampuan diri sendiri untuk bertindak. Dan kepercayaan diri penting adanya untuk menghapuskan rasa rendah diri, yang ditanam dalam jiwa rakyat Indonesia oleh penjajahan yang berabad-abad lamanya. Hanya dalam koperasi solidaritas dan individualitas dapat berkembang dalam hubungan yang harmonis.

Dengan menghidupkan dan memupuk solidaritas dan individualitas, koperasi mendidik dalam dada manusia rasa tanggung jawab sosial. Hatta pun menguraikan bahwa dalam koperasi mempunyai pokok-pokok dasar dan dasar-dasar moral yang harus dimiliki oleh koperasi. Pertama, pokok-pokok dasar walaupun di setiap negara berlainan sifatnya, tetapi ada lima dasar pokok yang tidak boleh diubah, sejak timbulnya koperasi yang pertama di Rochdale tahun 1884, yaitu :

1. Perkumpulan koperasi dikemukakan oleh anggotanya sendiri. Seluruh anggota ikut membicarakan dalam rapat berkala segala hal yang mengenai kemaslahatan koperasi.
2. Tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Satu orang satu suara, tidak peduli apakah iuran pokoknya atau simpanan pokoknya besar ataupun kecil. Tak ada anggota yang besar dan anggota yang kecil karena semuanya sama rata sama rasa.
3. Tiap-tiap orang dapat diterima menjadi anggota koperasi.
4. Keuntungan dibagi antara anggota menurut jasa mereka dalam memajukan perkumpulan. Misalnya, anggota yang banyak membeli barang-barang keperluannya pada koperasi lebih banyak pula memperoleh keuntungan daripada anggota yang sedikit membeli.
5. Satu bagian yang tertentu daripada keuntungan diperuntukkan pendidikan.

Dan kedua, dasar-dasar moral yang juga harus termuat dalam koperasi, yaitu :

1. Tidak boleh dijual dan dikedaiakan barang yang palsu.
2. Ukuran dan timbangan barang harus benar dan dijamin
3. Harga barang mesti sama dengan harga pasar setempat.
4. Jual beli dengan kontan.

Selain itu, Hatta juga mengingatkan, bahwa koperasi mempunyai tugas yang harus dikerjakan oleh koperasi itu sendiri. Adapun tugas dari koperasi menurut tempat, waktu dan keadaan tersebut adalah :

Pertama, memperbanyak produksi barang makanan dan barang kerajinan dan pertukangan yang diperlukan sehari-hari oleh rakyat kita dalam rumah

tangganya. Bukan saja perluasan tanah dan pekerjaan yang harus kita usahakan, tetapi juga intensitas pekerjaan. Koperasi harus usahakan supaya sesudah beberapa tahun tak perlu lagi kita mendatangkan makanan dan barang pertukangan dari luar negeri.

Kedua, tugas koperasi ialah memperbaiki kualitas barang yang dihasilkan rakyat. Misalnya, apabila diantara pengusaha karet dapat didirikan koperasi, maka dapat dibangun rumah-rumah pengasap karet kepunyaan bersama yang jumlahnya dapat diatur menurut keperluan. Tugas koperasi yang ketiga, ialah memperbaiki distribusi, pembagian barang kepada rakyat. Koperasi yang tujuannya ialah memenuhi atau melengkapi keperluan bersama, khususnya pada masa kelangkaan barang, karena banyak para pedagang yang suka mempermainkan barang dengan menumpuknya dan menjualnya sedikit-sedikit, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tugas koperasi yang keempat ialah memperbaiki harga, yang menguntungkan bagi masyarakat. Apabila penjualan hanya ditangani para pedagang, maka usaha mereka bertentangan dengan tujuan dagang yang sebenarnya yaitu menjual dengan semahal-mahalnya dengan modal sekecil-kecilnya. Maka perlu ada tindakan koperasi untuk mengadakan perbaikan harga koperasi yang tujuannya memenuhi keperluan hidup dapat memperimbangan kepentingan masyarakat dan perbaikan hidup orang-seorang sebagai anggota masyarakat.

Tugas koperasi yang kelima ialah menyingkirkan penghisapan dan lintah darat. Tugas koperasi yang keenam ialah memperkuat pengumpulan modal.



karena masyarakat kita (pada waktu itu) sangat kekurangan akan modal untuk keperluan produksi, maka pengumpulan modal oleh koperasi harus ditingkatkan dan cara untuk mencapainya ialah mepergiat kemauan menyimpan.

Tugas yang ketujuh dari koperasi ialah memelihara lumbung simpanan padi atau mendorong supaya tiap-tiap desa menghidupkan lumbung desa. Lumbung itu harus menjadi alat untuk menyesuaikan produksi dan konsumsi sepanjang masa dan juga menjadi alat penjaga penetapan harga padi. Dengan adanya lumbung itu diusahakan, supaya pada waktu panen kelebihan produksi dari keperluan konsumsi sementara tidak habis dijual dan harga padi tidak turun dari biasa.

Dengan persediaan padi dilumbung, cukup untuk makanan rakyat dari panen ke panen dan untuk di bibit, maka masa paceklik dapat diatasi. Kelebihan produksi padi didesa dari keperluan konsumsi dari panen ke panen diusahakan koperasi menjualnya di kota atau dibawakan ke daerah lain yang berkekurangan. Dan koperasi itu pulalah seboleh-bolehnya mengusahakan supaya rakyat desa memperoleh berbagai barang keperluan hidup lainnya sebagai tukaran padinya yang dijual.

### **C. Strategi Politik Ekonomi Mohammad Hatta**

#### **a. Menaikkan Daya Beli dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Rakyat**

Tujuan politik perekonomian dalam pandangan Hatta ialah menaikkan tenaga beli rakyat secara berangsur-angsur. Karena menurut Hatta rakyat tidak akan pernah terlepas dari kesengsaraan hidup, apabila tenaga beli riil-nya tidak bertambah dan perkembangan ekonomi suatu negara akan tetap tertahan, kalau

rakyat didalamnya tetap miskin, oleh karena itu rencana pembangunan harus didasarkan atas kenaikan tenaga beli yang meningkat (Hatta, hal. 34).

Dalam meningkatkan tenaga beli masyarakat, Hatta mengungkapkan bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan produksi. Hatta pun menyadari bahwa untuk meningkatkan tenaga yang produktif bukanlah perkara yang mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Oleh karenanya, hal tersebut hanya bisa dilakukan apabila ia dikerjakan menurut plan yang teratur dan konsekuen dalam mengerjakannya (Hatta, *Demokrasi Kita Bebas Aktif*, hal. 12)

Selanjutnya dalam menyelenggarakan kemakmuran, Hatta berpendapat harus menyelenggarakan lebih dulu kepentingan rakyat yang terpenting, yaitu makanan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Menurutnya kepentingan yang lima ini merupakan suatu hal yang penting dan esensial bagi kehidupan manusia dan bangsa yang beradab, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, Hatta menghendaki asas self-supporting atau “menolong diri sendiri”, walaupun ia menyadari bahwa proses menuju “menolong diri sendiri” itu memerlukan waktu yang lama dan cukup panjang dan tentu pada awalnya juga memerlukan bantuan luar negeri.

Dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat yang pertama yaitu menyempurnakan makanan rakyat, hal itu dilakukan dengan cara mencocokkn upah bagi rakyat dengan keperluan hidup yang lebih atas dari dasar minimum. Hatta berpendapat dalam menentukan upah minimum sehari ditentukan sama dengan harga 5 kilo beras. Itu baru upah minimum, dan upah ini bukanlah upah bagi pekerja yang mempunyai kualitas. Dan mengenai gaji pegawai negeri harus

dibuat peraturan, yang menyatakan bahwa perbedaan gaji pegawai kecil yang paling bawah sampai ke gubernur, tidak boleh lebih dari 20 kali. Hal ini dilakukan untuk menuju ke arah kemakmuran yang merata. Dengan adanya upah yang layak ini, maka rakyat tidak hanya bisa membeli makanan yang layak, akan tetapi juga bisa membeli pakaian yang pantas untuk mereka.

Lalu politik ekonomi baik itu yang sifatnya jangka pendek ataupun jangka panjang mengenai perumahan rakyat harus diadakan di seluruh Indonesia. Hatta juga menyadari dalam usaha memperbaiki tempat kediaman bagi seluruh rakyat adalah usaha yang sangat berat dan tidak sedikit ongkosnya serta juga memakan tempo yang lama, untuk modal awalnya Hatta menganjurkan negara mendirikan di tiap-tiap keresidenan suatu bank industri rumah, yang mana bank ini memberi uang muka, yang dapat diangsur sedikit demi sedikit oleh rakyat yang tertolong dengan rumah baru tersebut.

Mengenai masalah perumahan ini, Hatta secara implisit juga menyatakan bahwa antara perumahan yang layak dan kesehatan merupakan suatu hal yang berkaitan. Oleh karenanya setiap tahun hendaklah dibangun rumah-rumah baru untuk menampung rakyat yang bertambah dan gubuk-gubuk yang lebih merupakan kandang sapi harus berangsur-angsur dilenyapkan.<sup>165</sup> Lalu Hatta menyatakan bahwa kesehatan merupakan syarat yang mutlak untuk menuju kemakmuran. Karena tubuh yang tidak sehat membuat tenaga untuk berkerja menjadi lemah yang pada akhirnya akan menimbulkan turunnya produktivitas.

Selain itu yang terakhir dalam memenuhi kebutuhan dasar ialah memajukan pendidikan secepat mungkin. Bukan saja memperbanyak sekolah

untuk menambah kecerdasan rakyat, akan tetapi juga mementingkan didikan koperasi yang menjadi tiang perekonomian Indonesia di masa datang.<sup>167</sup> Hatta juga memandang pendidikan merupakan suatu hal yang penting, karena untuk membangun (negara ini) perlu dididik lebih dahulu tenaga-tenaga ahli baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

#### **b. Pembangunan Infrastruktur**

Dalam memandang politik perekonomian, Hatta menaruh perhatian yang sangat besar kepada masalah distribusi. Distribusi adalah sambungan daripada produksi untuk menyampaikan yang dihasilkan kepada si pemakai atau konsumen, oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang bersifat infrastrukturnal seperti jalan raya, pelabuhan dan lain-lainya dalam pandangan Hatta adalah pembangunan yang sifatnya tidak bisa dielakkan, dan perlu dilaksanakan dengan teratur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena jalan perhubungan tersebut, menurut pendapat Hatta adalah sebuah urat nadi perekonomian.

Pembangunan ini yang menghendaki pembaruan alat-alat yang begitu banyak, yang ongkosnya tidak sedikit, mungkin juga tidak dapat dibiayai dengan modal dari negara, dan mungkin juga harus dilaksanakan dengan modal pinjaman luar negeri yang berjangka panjang, berpuluh tahun lamanya. Namun dengan administrasi dan organisasi yang baik dan efisien, Hatta meyakini tujuan tersebut dapat dicapai.

### **c. Politik Industrialisasi dan Transmigrasi**

Hatta berpendapat bahwa dengan industri saja tak akan cukup akan mencapai kemakmuran rakyat. Industri mestinya bertempat di daerah yang ramai. Akan tetapi kalau penduduknya terlalu banyak seperti pulau Jawa, pangsa maka pasar untuk menjual barangnya semakin berkurang. Oleh karena itu, Hatta mengatakan politik perkonomian yang positif dalam menuju kemakmuran rakyat ialah mengadakan secara besar-besaran transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau seberang, yang disertai pula dengan politik industrialisasi. Begitu pula sebaliknya, transmigrasi saja dengan tidak disertai dengan industri tidak akan melepaskan kesusahan rakyat, melainkan hanya menundanya saja.

Transmigrasi gunanya untuk mengadakan koreksi dalam hal persebaran penduduk. Persebaran penduduk yang sangat timpang, menjadi halangan besar untuk memajukan industrialisasi sebagai politik kemakmuran rakyat. Hatta berpendapat bahwa persebaran penduduk yang sangat timpang seperti ini jelas akan membahayakan apabila pemerintah sebagai stakeholder tidak segera mengambil tindakan yang serius dalam masalah ini.

Hatta menguraikan dengan penduduk pulau Jawa yang terlalu rapat, yaitu 360 orang per km persegi (pada tahun 1946), yang tidak mempunyai tenaga pembeli, tidak akan dapat dibangun berbagai macam industri yang akan menjadi tiang kemakmuran rakyat. Tanah seberang penduduknya terlalu jarang, yaitu 12 orang km persegi, sehingga tidak mungkin diadakan lebih dulu perbaikan dalam hal persebaran penduduk dengan jalan transmigrasi besar-besaran, sebab

penduduk yang akan dipindahkan itu harus masyarakat kecil yang lengkap susunannya dan diperlengkapi pula dengan alat kerja yang modern, bukan pemindahan orang banyak, sebagai orang-seorang.

Dalam proses pemindahan tersebut, secara rinci, Mohammad Hatta menjelaskan pelaksanaan transmigrasi menyangkut dua hal : Pertama, rakyat dipindahkan itu ditempatkan di tempat yang telah terbuka, tetapi dilengkapi dengan persediaan hidup baru. Mereka tidak bakal mengerjakan pertanian, tetapi akan dipekerjakan dalam industri, transport dan lain-lain. Pendeknya, ditempat mereka itu harus diadakan pusat industri, dibangun kota dan dengan membangun kota dan pabrik itu, maka secara tidak langsung akan terbukanya pintu pekerjaan bagi mereka yang baru datang, antara kota dan desa sekelilingnya timbul pertukaran penghasilan.

Kedua, Transmigrasi itu harus diadakan dengan membuka hutan dan membuat jalan transportasi dan membasmi sarang penyakit. Untuk pekerjaan tersebut saja sudah harus memerlukan beribu-ribu tenaga kerja untuk mengerjakannya. Usaha tersebut tidak saja memberikan pekerjaan dan memerangi pengangguran. Namun, disamping usaha membuka hutan itu, dapat juga diadakan secara serentak berbagai usaha lain, yaitu kayu yang ditebang tersebut dapat dijadikan barang yang sifatnya ekonomis.

Kemudian, apabila persebaran penduduk sudah lebih baik, maka dasar penghidupan di tanah jawa pun akan bertambah baik, dan tenaga pembeli rakyat di pulau tersebut akan bertambah besar. Disamping itu, di tanah seberang di tempat-tempat yang dibuka itu, munculnya tenaga-tenaga pembeli baru. Dengan

bertambahnya tenaga pembeli rakyat, dapatlah didirikan berbagai industri, yang pada gilirannya nanti memperbesar pula tenaga pembeli yang ada.

#### **d. Penguasaan Cabang-Cabang Produksi oleh Negara yang Menyangkut Hajat**

Hidup Orang Banyak Hatta menyatakan bahwa air, listrik, gas atau bahan bakar minyak lainnya harus cukup bagi rakyat dan murah harganya. Rakyat tidak dapat dikatakan bahagia apabila menderita kekurangan dalam hal tersebut. Oleh karena itu dalam menilai masalah ini, negara harus menerapkan program ekonomi nasional, dengan cara mengambil alih dan menguasai cabang-cabang produksi seperti bahan tambang, pelabuhan, pos, listrik dan lain-lain demi kemakmuran rakyat.

Ekonomi nasional yang dipraktikkan disini, bukan berarti negara harus mengganti bangsa asing tersebut dengan bangsa Indonesia, karena menurutnya ekonomi nasional berarti membangun ekonomi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Karena dalam pendapat Hatta, tidak ada bedanya antara kapitalis asing diganti kapitalis Indonesia, karena kapitalis sama-sama memeras rakyat. Malahan kadang-kadang kapitalis asing itu, yang lebih banyak modalnya dan persediannya, lebih besar memberi jaminan kaum buruh.

Lalu dalam penerapan ekonomi nasional tersebut, apabila bangsa ini tidak mempunyai orang-orang yang ahli untuk menjalankan perusahaan tersebut, perusahaan negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak maksudnya, hal itu bisa dijalankan dengan mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri, kalau perlu dengan bayaran yang mahal dan pantas, tapi dengan catatan bahwa dalam

beberapa waktu kemudian mereka mendidik orang-orang Indonesia supaya bisa menggantikannya kemudian. Dalam hal ini, Hatta mencontohkan negara Rusia yang menyelenggarakan plan lima tahunnya dengan mendatangkan orang-orang dari Amerika, dan Jerman yang bahkan menggaji ahli-ahli dari bangsa asing sampai 25 kali lipat dari gaji orang-orangnya sendiri.

#### **e. Pembangunan Bank untuk Membangun Roda Perekonomian**

Organisasi dan kedudukan bank pada satu negeri adalah cermin dari pada keadaan dan kemajuan ekonominya. Pembangunan nasional yang dipaparkan Hatta seperti, pengentasan kemiskinan, membangun perumahan, pelaksanaan transmigrasi dan politik industrialisasi, mau tidak mau memerlukan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dalam pandangan Hatta Bank perlu diadakan untuk menyokong kemajuan perekonomian Indonesia.

Tetapi sebagai seorang muslim yang taat, Hatta menyadari bahwa pembangunan bank ini tidak terlepas dari adanya bunga yang akan dipraktikkan bank-bank tersebut nanti. Dalam memandang bunga, Hatta menolak apabila bunga disamakan dengan riba, karena menurutnya, semangat yang dimiliki oleh bunga berbeda dengan semangat yang ada pada riba. Semangat bunga menurutnya adalah semangat yang produktif, yang mana uang tersebut digunakan untuk membuat perusahaan atau memajukan perusahaan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kemajuan perekonomian. Berbeda dengan bunga, semangat yang diusung riba adalah semangat yang konsumtif dan juga menghancurkan, dalam artian, orang tidak akan meminjam suatu uang dengan bunga bukan untuk berusaha, namun untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi orang yang



meminjam tersebut. Hatta juga menganalisis bahwa timbulnya larangan riba disebabkan karena riba merupakan pintu gerbang awal menuju sebuah perbudakan. Hatta mengatakan :

*“jika kita perhatikan keadaan masyarakat, tatkala agama diturunkan Allah ke dunia. Di masa itu orang rata-rata hidup dalam masyarakat agrarian. Pertanian yang menjadi pokok yang terutama. Perniagaan hampir tidak dikerjakan orang biasa. Pertanian secara dahulu tidak memakai kapital, selain dari alat bekerja satu dua. Faktor usaha yang terutama ialah tanah dan pekerjaan manusia. Untuk mengerjakan tanahnya, orang tak perlu meminjam kapital, betapa juga miskinnya. Kapital tak perlu buat berusaha. Dan siapa yang meminjam uang, biasanya ia meminjam untuk keperluan hidupnya. Boleh jadi karena musim kemarau, pertaniannya tidak berhasil. Pinjamannya itu ialah pinjaman konsumtif, pinjaman buat ongkos makan. Bukan pinjaman produktif, untuk berusaha. Oleh karena itu dipinjam untuk membeli barang makanan, maka sukar bagi si peminjam akan mengembalikannya kemudian. Apalagi jika ia diberati dengan rente yang tidak ringan. Kalau cuma jumlah rente yang dibayar saban tahun atau saban bulan atau saban minggu induk utangnya tidak akan pernah lunas. Uang pengembalian utangnya itu mesti didapatinya kelak dari hasil tanahnya. Dan apabila hasil itu cukup buat dimakan saja, alangkah susah baginya memisahkan beberapa bagian untuk angsuran utangnya dengan rentenya. Waktu meminjam itu tidak dipikirkannya, dapat tidaknya ia mengembalikan utang itu kelak. Yang terasa benar baginya ialah keperluan sekarang, kesakitan hidupnya di waktu itu. Keperluan di masa datang masih kabur bagi pandangan jiwanya. Asal dapat ia meminjam, segala peraturan si tukang riba diterimanya. Karena pinjaman itu sering terjadi, bahwa hartanya habis tergadai untuk pembayar utang. Jika harta habis sama sekali, utang dibayar dengan badan. Ia menjadi budak kepada orang tempat ia berutang. Di zaman berbudak itu, utang menjadi sebab perbudakan. Diwaktu itu orang yang meminjam, kebanyakan orang yang miskin, yang tidak mempunyai tahan buat hidup. Rente yang tidak terbayar sering menghilangkan kemerdekaan si peminjam. Sebab itu tak heran, jika rente dilarang keras oleh agama” (dikutip dalam buku Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia, hal 103).*

Hatta juga melanjutkan bahwa bunga adalah bagian dari keuntungan yang dicapai dari usaha tersebut, cuma caranya sedikit berbeda dengan pembagian keuntungan pada umumnya, seperti 50:50, namun pada bunga jumlah bagian itu

ditetapkan terlebih dahulu yaitu sekian persen dari modalnya. Karena akan sangat sulit bagi bank yang melayani beratus-ratus transaksi kredit untuk menentukan kesepakatan mengenai pembagian keuntungan dengan orang seorang, oleh karena itu pembayaran yang disertai bunga dalam pandangan Hatta lebih mudah dan rasional untuk dijalankan.

Hatta juga mengkritik para ulama yang mengusulkan agar bank menghindari pembayaran bunga kepada nasabah, melainkan membagikan keuntungan habis tahun kepada mereka yang mempunyai andil dan uang simpanan. Akan tetapi usul ini, menurut Hatta sukar untuk dilakukan bagi bank yang banyak peraturan kreditnya, selain itu hal ini menyulitkan pekerjaan dan memperbanyak administrasi untuk menghitung bagian masing-masing dengan secara adil, seperti pembagian deposito yang beragam jangka waktunya, penyimpanan biasa dan lain sebagainya. Dalam menilai ulama yang mengajukan usul ini, Hatta secara tegas mengatakan bahwa usul ini tidak praktis.

Bank tanpa bunga, Hatta tidak dapat membayangkannya, akan tetapi lain lagi ceritanya apabila pengurus dan pegawainya semuanya orang kaya yang bekerja tidak mendapatkan upah akan tetapi hanya mengharapkan ridho Allah semata, akan tetapi sayangnya orang itu tidak ada (atau mungkin lebih tepatnya belum ada). Oleh karena itu Hatta secara tegas pula mengatakan, bahwa orang yang menolak bunga ini, lebih baik ia menolak kemajuan, sebab bank tidak akan ada bila tidak adanya bunga. Hatta mengatakan :

*“Siapa yang tak suka kedudukan rente apa juga, lebih baik ia menolak kemajuan, menolak adanya bank. Perusahaan bank tidak terlepas daripada perhitungan rente. Itulah sendinya. Rente adalah bayaran atas*

*pinjaman kapital*” (dikutip dalam buku Muhammad Hatta, Ekonomi Industri, hal 59).

Hatta juga mengkritik orang yang berpandangan bahwa bunga itu hanya berasal dari uang yang berlebih dari pinjaman, akan tetapi kalau uang itu digunakan untuk membeli rumah dan tanah dan menerimanya sebagai sewa tanah, hal itu tidak menjadi bunga. Menurut Hatta hal ini tidak ada bedanya dan sama saja. Hatta melanjutkan kritiknya kepada bank yang mengaku menolak bunga, akan tetapi, menutupinya dengan istilah “ongkos administrasi”. Padahal hal itu sama saja dan tidak ada bedanya dengan bunga, yakni ongkos administrasi itu dihitung sekian persen dari jumlah pinjaman, Hatta menjelaskan :

*“Hingga sekian benar teorinya untuk menghilangkan rupa pemungutan rente itu. Tetapi betapa praktiknya? Dalam praktik jumlah ongkos administrasi itu dihitung menurut besar pinjaman, dengan menentukan sekian persen daripada jumlah yang dipinjamkan. Ada satu dua bank muslimin yang menghitung ongkos administrasi itu 1½ % sebulan dengan 18 % setahun. Pembayaran yang dihitung sekian persen daripada jumlah pinjaman adalah rente, sekalipun disebut ongkos administrasi. Kalau benar rente yang dibayar si peminjam itu ongkos administrasi semata-mata, maka ongkos itu tidak patut berbeda jumlah pinjamannya. Menuliskan utang si A sejumlah Rp 100.000,- tidak berapa beda lelahnya dengan menuliskan utang si B sejumlah Rp 1000,- atau utang si C sejumlah Rp 100,-. Luas kertas tempat menuliskannya juga kira-kira sama. Apa sebabnya berat pikulan itu dibagi menurut besarnya pinjaman?”* (dikutip dalam buku Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi jilid II, hal 207).

Melihat kenyataan tersebut, Hatta menganjurkan agar para ulama pada saat ini tidak hanya mempelajari masalah agama saja, akan tetapi juga mempelajari masalah sosial, ekonomi dan hukum, agar memahami perkembangan zaman. Dan Hatta juga memperingatkan para ulama agar tidak memperhatikan huruf dari larangan agama saja, melainkan semangat yang dibawa dari larangan tersebut.

Melanjutkan soal bunga ini, pada suatu segi hidup yang lain dalam perekonomian rakyat Indonesia, Hatta mengatakan bahwa bank pasar yang didirikan di beberapa tempat untuk orang kecil sudah termasuk riba. Ia mengambil contoh bahwa pada bank pasar tersebut seseorang membuat pinjaman f 1 –dengan rente 3 sen sehari selama 40 hari. Ini berarti 40 persen dalam 40 hari atau 360 % setahun- ini riba tegasnya. Rupanya soal tinggi rendahnya rente sangat berarti bagi Hatta dalam menilai rente itu sendiri.

#### **f. Masalah Bantuan Asing**

Lalu selain pembangunan bank, Hatta berpendapat bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasional, maka negeri ini harus memperhitungkan bantuan asing sebagai modal pembangunan. Dan dalam keseluruhannya corak bantuan perkembangan yang diperlukan Indonesia adalah sebagai berikut :

Pertama, bantuan untuk membentuk apa yang sering disebut human capital, untuk memperoleh seorang pandai yang berpengalaman dan mahir dalam bekerja. Kedua, bantuan modal untuk membiayai proyek-proyek infrastrukural, seperti jalan-jalan besar, pelabuhan, memperbaiki aliran-aliran sungai, membuat kanal dan lainnya. Ketiga, bantuan untuk melaksanakan pre-investment activities, seperti mengadakan penyelidikan geologi, biayanya sebagian atau sepenuhnya dapat dipikul oleh Indonesia. tetapi tenaga ahlinya sebagian harus datang dari luar negeri. Keempat, bantuan modal untuk memperbesar sistem saluran air dan waduk pada berbagai daerah di Indonesia guna mengintensifkan dan melipatgandakan hasil bumi.

Sebagian dari sistem saluran ini dapat sekaligus jadi sumber pembangunan tenaga listrik untuk industri dan penerangan. Kelima, bantuan modal untuk pembangunan berbagai macam industri dasar dan tambang serta industri lainnya yang penting bagi rakyat. Modal yang dipinjam itu dibayar kembali berangsur-angsur dengan hasil perkembangan produksi itu sendiri. Lalu mengenai bantuan asing yang berupa pinjaman uang, Hatta mengemukakan syarat-syarat yang harus ditempuh apabila negara ini mau meminta pinjaman asing tersebut, yaitu :

1. Negara yang memberi pinjaman tidak mencampuri politik dalam negeri negara yang meminjam (Indonesia).
2. Bunga yang dipinjamkan tidak boleh lebih dari 3-3,5 persen setahun, dan
3. Jangka kredit itu jangka lama. Kalau untuk industri boleh antara 10-20 tahun.

Tetapi kalau kredit untuk membangun jalan-jalan, pengairan dan pembangunan listrik, kredit dapat lebih lama lagi jangkanya. Hatta memperhitungkan bahwa syarat-syarat ini bisa dipertimbangkan bagi negara pendonor. Karena menurut Hatta, setelah perang dunia ke II, negara-negara maju mengalami kemajuan industri yang sangat luar biasa, sementara negara-negara yang baru terlepas dari belenggu penjajah kondisi kemajuan perekonomiannya masih sangat tertinggal. Hatta menganalisis, bahwa jurang perekonomian yang begitu lebar ini bisa mengganggu dan menggoyahkan eksistensi perekonomian negara-negara maju, hal itu disebabkan negara-negara maju tidak mempunyai pangsa pasar untuk menjual barang-barang yang dihasilkannya apabila negara-

negara yang baru merdeka tersebut masih miskin. melihat keadaan ini jelas negara-negara maju mempunyai kepentingan dalam memberikan bantuan finansial kepada negara-negara yang baru merdeka tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi politik Mohammad Hatta dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Menaikkan Daya Beli dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Rakyat, dengan tujuan politik perekonomian dalam pandangan Hatta ialah menaikkan tenaga beli rakyat secara berangsur-angsur. Karena menurut Hatta rakyat tidak akan pernah terlepas dari kesengsaraan hidup.
2. Menaikkan Infrastruktur dengan tujuan Pembangunan ini yang menghendaki pembaruan alat-alat yang begitu banyak, yang ongkosnya tidak sedikit, mungkin juga tidak dapat dibiayai dengan modal dari negara, dan mungkin juga harus dilaksanakan dengan modal pinjaman luar negeri yang berjangka panjang, berpuluh tahun lamanya. Namun dengan administrasi dan organisasi yang baik dan efisien, Hatta meyakini tujuan tersebut dapat dicapai.
3. Politik Industrialisasi dan Transmigrasi dan Penguasaan Cabang-Cabang Produksi oleh Negara yang Menyangkut Hajat, dengan tujuan dalam penerapan ekonomi nasional tersebut, apabila bangsa ini tidak mempunyai orang-orang yang ahli untuk menjalankan perusahaan tersebut, perusahaan negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak maksudnya, hal itu bisa dijalankan dengan mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri,

4. Pembangunan Bank untuk Membangun Roda Perekonomian dan Masalah Bantuan Asing, dengan tujuan selain pembangunan bank, Hatta berpendapat bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasional, maka negeri ini harus memperhitungkan bantuan asing sebagai modal pembangunan.

## **B. Saran**

Penelitian yang dilakukan telah berhasil mendeskripsikan bagaimana strategi politik yang digunakan oleh Mohammad Hatta dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, dengan mencakup perencanaan, realisasi, dampak, dan juga faktor yang memengaruhi. Maka saran dari penelitian adalah:

1. Bagi pemerintah perlu adanya tahap lanjutan atau sikap tegas dari pemerintah untuk mengingat kembali sejarah terkait strategi politik Mohammad Hatta.
2. Bagi masyarakat Indonesia kedepannya diharapkan lebih aktif lagi dalam keikutsertaan dalam pemerintahan dan juga menjaga hasil dari program strategi yang telah di gunakan oleh Mohammad Hatta untuk Indonesia.
3. Untuk peneliti kedepannya tentang strategi politik kepemimpinan Mohammad Hatta agar bisa lebih mendalam lagi mengenai data-data dan permasalahan yang ada di lapangan.